

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan di kabupaten karimun dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Karimun telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Karimun, untuk seluruh masyarakat terkhusus nya Masyarakat kurang mampu di Kabupaten Karimun, sehingga mendapatkan kemudahan, dalam pelayanan kesehatan. Melalui kehadiran BPJS Ketenagakerjaan bisa membantu pemerintah daerah untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya (Redaksi Karimun 2019).

Adapun kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun yaitu Kecamatan Belat, Kecamatan Buru, Kecamatan Durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Meral, Kecamatan Moro, Kecamatan Tebing, Kecamatan Ungar. Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun ,peneliti memfokuskan satu kecamatan untuk di teliti dari program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan ini yaitu, Kecamatan Durai yang terdapat 4 desa diantaranya Desa Telaga Tujuh , Desa Tanjung Kilang, Desa Semembang, dan Desa Sangglar.

Penerapan program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan di Kecamatan Durai yang dialurkan dari pemerintah untuk masyarakat mendapatkan sebuah asuransi kesehatan di berlakukan untuk golongan miskin yang di tanggung oleh pemerintah yang dicabangkan di Tanjung Balai Karimun, untuk memperoleh

informasi, diamanatkan telah berjalan selama 8 tahun sejak mulai beroperasi pada 01 Januari 2014. Memasuki tahun ke-9, Puskesmas Kecamatan Durai membuka layanan tatap muka, untuk peserta dapat melakukan berbagai layanan seperti pendaftaran klaim BPJS, perubahan data, permintaan informasi dan layanan lainnya, ketika Puskesmas Kecamatan Durai tidak bisa menangani pasien maka akan dibuat surat berupa rujukan. Kebijakan tentang rujukan kesehatan masyarakat miskin yang diterapkan dari 2019 hingga sekarang, ialah Peraturan Bupati Karimun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kabupaten Karimun

Masyarakat Kecamatan Durai dari pihak Puskesmas ketika Hal ini dilakukan untuk mempermudah peserta yang ingin memperoleh layanan dengan mempertimbangkan masyarakat yang masih terbatas mengakses layanan secara digital, tanpa harus datang ke kantor cabang. Dan di terapkan untuk penerima kartu BPJS yang bukan penduduk Kecamatan Durai mendapatkan 3 kali pengobatan ,terlebih itu akan di minta pembayaran, tetapi untuk pendaftarannya masyarakat menunggu waktu yang lama sehingga masyarakat kebanyakan tidak mau mengurus kartu BPJS tersebut, dengan itu pasien yang berobat lebih banyak bukan penerima BPJS di bandingkan penerima BPJS, yaitu Dan sebagian warga kecamatan Durai tidak tahu hal itu dikarenakan kurang nya sosialisasi dan komunikasi antar pihak rumah sakit dengan pasien yang berobat di puskesmas Kecamatan Durai (Olah data peneliti 2023).

Tabel 1.1 Dasar Hukum Terbentuknya BPJS

Dasar Hukum Terbentuknya BPJS	
Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007	Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah
Undang – Undang No 40 Tahun 2004	Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang – Undang No 29 Tahun 2004	Tentang Praktik Kedokteran
Undang – Undang No 44 Tahun 2009	Tentang Rumah Sakit
Undang – Undang No 24 Tahun 2011	Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Sumber: Departemen Kesehatan, 2015

Seiring melonjaknya jumlah penduduk di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di daerah Kecamatan Durai Kabupaten Karimun,. Sehingga peneliti mengambil lokasi tersebut Dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk Kecamatan Durai Kabupaten Karimun berkisar 164, 38 jiwa, lalu pada tahun 2020 mencapai 166,31 jiwa, kemudian mengalami kenaikan 2021 yakni mencapai 170,24 jiwa , atau 80% jiwa diantaranya termasuk dalam kategori penduduk miskin. Dari total jumlah Penduduk Kecamatan Durai Kabupaten Karimun dengan jumlah penerima kartu BPJS di Kecamatan durai keseluruhan yaitu 4.600 jiwa , sehingga sangat membantu masyarakat miskin untuk pengobatan di Kecamatan Durai (Redaksi Karimun, 2021).

UPT Puskesmas Kecamatan Durai telah menyediakan fasilitas sarana prasarana untuk memudahkan masyarakat untuk ketika puskesmas tepatnya di

Puskesmas Jl Kapten Mukhtar, Kecamatan Durai. Sebagai mana dilihat dari data berikut ini.

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Kerja Puskesmas Durai Gambar

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keadaan	Keterangan
1.	Bangunan Puskesmas	3 unit	1 baik, 2 kurang	Bangunan rawat inap kelas I sampai III kurang baik
2.	Bangunan Puskesmas Pembantu	2 unit	Kurangbaik	Semembang, Sanglar
3.	Kendaraan Roda 2	12 unit	Baik 6 , Kurang 6	Pengadaan 5 unit 2020
4.	Laptop	4 unit	Kurang baik	Pengadaan Dana JKN (2018)

Sumber Data: Data Internal Puskesmas Kecamatan Durai Tahun 2023

Dilihat dari data berikut bahwa adanya keterbatasan fasilitas yang ada di kecamatan durai, yang dimana salah satu keluhan dari masyarakat dan staf puskesmas itu sendiri, karena salah satu bentuk penilaian dalam sarana dan prasarana dalam fasilitas kesehatan adalah dalam bentuk akreditasi, yang dimaksudkan untuk tetap adanya tata kelola yang bisa memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pasien, segala sarana dan prasarana yang dapat menunjang kepada kesehatan kita, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, kita akan semakin bersemangat dalam menjaga kesehatan apabila banyak fasilitas penunjangnya, (Budi Winarno 2019).

Adapun beberapa tanggapan masyarakat pengguna kartu BPJS terkait pembayaran yang di minta pihak puskesmas Durai, yaitu jenis penyakit kejang

demam yang di minta pihak puskesmas sebesar Rp 300.000 (rawat inap) dan penyakit cacing pada anak sebesar Rp 95.000 (sehari pembayaran), dan di dahulukan pengobatan penerima kartu BPJS jika yang membayar di bandingkan secara gratis, padahal pasien penerima BPJS sudah mendahului pendaftaran dibandingkan pasien tidak penerima BPJS, dilihat dari tanggapan tersebut bahwa minim nya pelayanan yang didapat kan dengan memberikan pasien ketidakadilan dan membeda-bedakan (Data Primer). Yang di mana diatur di dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pelayanan publik yang baik juga bisa dilihat melalui indikator yang sifatnya fisik pelayanan dalam bidang kesehatan dengan tidak ada perbedaan. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, jenis penyakit yang di jamin Program badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan , dijamin dari segi semua penyakit terkecuali penyakit yang melawan hukum seperti ketabrak kereta di saat meminum - minuman alkohol.

Berdasarkan data berikut peneliti melihat masih ada keluhan yang di alami masyarakat kecamatan durai, yang dimana mereka yang memiliki kartu BPJS masih ada kata pembayaran yang di inginkan dari pihak staf puskesmas kecamatan durai. BPJS ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang kurang mampu untuk berobat.

kartu BPJS masih ada kata pembayaran yang di inginkan dari pihak staf puskesmas kecamatan durai. BPJS ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang kurang mampu untuk berobat akan tetapi banyak permasalahan

secara teknis yang diterima masyarakat yaitu perbedaan pandangan masyarakat yang dilihat dari pembayaran, fasilitas yang kurang memadai, dan penurunan ditingkat pelayanan.

Tabel 1.3 Hasil Kinerja Cakupan Pelayanan Puskesmas Kecamatan Durai

No	Tingkat Kinerja	2021		2022		2023	
		Baik	Kurang baik	Baik	Kurang baik	Baik	Kurang baik
	Kesehatan Lingkungan	97	83	111	175	18	27
	Gizi Anak	89	66	69	33	18	10
	Pengobatan	110	80	89	116	20	14

Sumber Data: Olah Data Peneliti

Berdasarkan data berikut peneliti melihat dari tahun 2021-2023 ada kenaikan dan penurunan dalam kinerja puskesmas Kecamatan Durai dalam pelayanannya, dimana data berikut diperoleh peneliti dari pihak puskesmas, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada kegelisahan dari masyarakat walaupun hanya sebagian masyarakat yang berpartisipasi memberi tanggapan dan komentar.

Kebijakan BPJS diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang kurang mampu untuk berobat, akan tetapi banyak permasalahan secara teknis dan pelayanan, maka dari itulah perlunya sosialisasi mendalam mengenai program BPJS dan penambahan Sumber daya manusia, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Durai Kabupaten Karimun”** dikarenakan pertama, peneliti menemukan adanya permasalahan di puskesmas kecamatan durai saat peneliti mendatangi puskesmas tersebut. Kedua, BPJS ini memiliki Keutamaann sendiri yaitu : BPJS Kesehatan untuk seumur hidup , Semua penyakit di tanggung, dan Mayoritas Biaya Dokter ditanggung, karena BPJS Kesehatan menargetkan seluruh masyarakat Indonesia, tak mengenal kaya maupun miskin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan dijelaskan, maka penelitian ini memfokuskan pada masalah yang akan penulis bahas yaitu bagaimana implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di puskesmas Kecamatan Durai Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di puskesmas Kecamatan Durai Kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesudah mendapatkan deskripsi hasil dari pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis seperti:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam kajian teori implementasi kebijakan program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yaitu teori Edward, dan Van Metter, Van Horn ada kesamaan indikator sumber daya dan komunikasi. Dari penelitian peneliti melihat ada tiga aspek namun Edward, dan Van Metter Van Horn tidak melihat ketiga aspek tersebut yaitu aspek peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan , menciptakan program yang baik , aturan pengurus badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti harap, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi Dinas kesehatan Kabupaten Karimun dalam menangani permasalahan pertama, pelayanan yang menurun, kedua kurangnya fasilitas sarana prasarana, dan ketiga, perbedaan pembayaran antara penerima BPJS dan tidak penerima BPJS. Untuk meningkatkan kinerja puskesmas dan rumah sakit di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun terkhusus nya bagi bidang kepengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).